

SKRIPSI

ANALISIS DESKRIPTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO

AMILUDDIN



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS DESKRIPTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**AMILUDDIN
A11108297**



Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS DESKRIPTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO

Disusun dan diajukan oleh

AMILUDDIN
A111 08297

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar, 13 Januari 2013

Pembimbing I


Dr. Paulus Uppun, SE.,MA
NIP. 19561231 198503 1 015

Pembimbing II


Fitriwati Djam'an, SE.,M.Si
NIP. 19800821 200501 2 002

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE.,MA
NIP. 19630625 198703 2 001

SKRIPSI

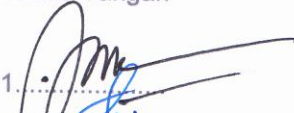




ANALISIS DESKRIPTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO

Disusun dan diajukan oleh

AMILUDDIN
A111 08 297

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 Februari 2013** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Paulus Uppun, SE., MA	Pembimbing I	1. 
2	Fitriwati Djam'an, SE., M.Si.	Pembimbing II	2. 
3	Dr. Nursini, SE., MA	Penguji	3. 
4	Drs. Bakhtiar Mustari, SE., M.Si	Penguji	4. 
5	Suharwan Hamzah, SE., M.Si	Penguji	5. 

Panitia Penguji dan Pembimbing,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., M.A.

NIP. 196306251987032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Amiluddin
NIM : A11108297
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS DESKRIPTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,



PRAKATA



Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji dan syukur hanya kepada Allah SWT dan Rasullullah SAW, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kelimpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo**" dengan baik. Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan segenap rasa cinta, kasih sayang dan doa untuk senantiasa membimbing penulis kearah jalan yang diridhoi Allah SWT, serta memberikan dorongan, perhatian, kritik dan dukungan baik bersifat moril maupun materil sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana. Untukmu Ayahanda H. Ambo Angka dan Ibunda Hj. Indo Tendri kupersembahkan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Muh. Ali, SE., MS., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Ibu Prof. DR. Hj. Rahmatia, MA., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

4. M. Agung Ady Mangilep, SE.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi.
5. Bapak Dr. Paulus Uppun, SE., MA yang selaku Pembimbing I dan Ibu Fitriwati Djam'an, SE., Msi selaku pembimbing II penulis yang dengan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Paulus Uppun, SE., MA selaku penasehat Akademik. Terima kasih atas berbagai masukan, nasehat dan bantuannya dalam mencapai penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu kami dalam hal administrasi. Khusus buat Pak Parman, Pak Hardin, Pak Safar, Pak Abang, Pak Budi, Ibu Ros, Ibu Hj. Saidah, Pak H. Muis dan Pak Limbas terima kasih atas semua bantunnya selama ini.
9. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kota Palopo beserta jajarannya, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu pada Kantor Badan Pusat Statistik Kota Palopo. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan dan penyediaan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku yang setia menemani baik suka dan duka, terutama saudara seprejuangan di FoSEI, LDK FKMKI, HIMAJIE.

Kalian adalah bagian dari perjalanan hidup penulis. Maafkan semua kesalahan dan kekhilafan yang selama ini dan teruslah berjuang saudara.

12. Semua teman-temanku IE 08' "ICONIC" terimakasih atas semuanya, penambahan nama dibelakang sebaiknya tidak akan mengurangi interaksi dan idealisme kita.

Penulis menyadari masih banyak pihak yang berperan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Walaupun belum sempat menyebutkan namanya satu per satu, tetapi penulis sangat menghargai atas segala bantuan yang diberikan.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kemampuan dan pengalaman sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat menambah wawasan penulis serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Makassar, 25 Maret 2013

Penulis

ABSTRAK

Analisi Deskriptif Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Descriptive Analysis Revenue Palopo City

Amiluddin

Paulus Uppun

Fitriwati Djam'an

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo tahun 2007-2011 dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo tahun 2007-2011.

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data *time series* yang diambil dari tahun 2007-2011. Adapun metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan sumbangan terbesar terhadap PAD Kota Palopo 5 tahun terakhir yaitu tahun 2007- 2011 didominasi oleh pendapatan retribusi daerah dengan rata-rata 68 persen, kemudian pendapatan pajak dengan rata-rata 18 persen, pendapatan lain-lain yang sah dengan rata-rata 8,86 persen, dan pendapatan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata 3,23 persen. Diantara faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), PDRB lebih berpengaruh dibandingkan dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah meskipun tidak signifikan karena perubahan PDRB selalu naik kecuali ditahun 2010 dan cenderung konstan atau dengan kata lain perubahannya teratur.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan agar pendapatan retribusi semakin optimal, maka dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur dan kebijakan ketat penarikan retribusi daerah. Agar penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan penyalurannya ke masyarakat efektif dan efisien maka sebaiknya dilakukan penataan kembali organisasi DPPKAD yaitu mengembalikan keformat awal menjadi dua SKPD yaitu dinas pendapatan daerah (DISPENDA) dan dinas pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD). Sehingga hasilnya lebih optimal karena paku belanja tidak terlalu besar, akhirnya bisa fokus mengurus penerimaan dan yang lain mengurus penyaluran (belanja).

Kata kunci: *retribusi, pajak, pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan yang dipisahkan, PDRB, penduduk, pengeluaran pemerintah.*

This study aimed to determine the contribution of each source of revenue (local taxes, levies, which separated the wealth, and other legitimate PAD) to total revenue (PAD) Palopo years 2007-2011 and for identify the factors that influence the increase in local revenue (PAD) Palopo years 2007-2011.

The data used are secondary data types dimabil time series data from the year 2007 to 2011. The method used is descriptive analysis. Results of this study showed results of this study showed the highest contribution to the PAD Palopo last 5 years ie the year 2007 to 2011 was dominated by the local levy revenue by an average of 68 percent, then the income tax by an average of 18 percent, other income legitimate with an average of 8.86 percent, and revenue denagn separated areas on average 3.23 percent. Among the factors considered to influence the increase in local revenue (PAD), GDP is more influential than the total population and government spending although not significant due to changes in GDP always niak except in 2010 and tended constant or in other words, changes regularly.

Thus the results of this study are expected to be the optimal income levy, then the increase in infrastructure construction and strict policy withdrawal levies. Order acceptance local revenue (PAD) and its distribution and efficient civic ekftif then, should be done DPPKAD organizational realignment that keformat returns on education are beginning to be two Dipenda (DISPENDA) and the financial management of the service area assets (DPPKAD). Thus the result is optimal because shopping is not too big nails, finally can focus on taking care of the reception and the others take care of expenses (shopping).

Keywords: levies, taxes, other income are legitimate, separate income, GDP, population, government spending.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teoritis	8
2.1.1 Teori dan Konsep Pembangunan	8
2.1.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.....	9
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2.1.4 Sumber-sumber PAD	14
2.2 Hubungan Antar Varabel.....	15
2.3 Tinjauan Empiris.....	18
2.4 Kerangka Pemikiran.....	20
2.5 Hipotesis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	23

3.2 Daerah Penelitian	23
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.4 Metode Pengumpulan Data	24
3.5 Metode Analisis	24
3.6 Defenisi Operasional	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo.....	27
4.1.1 Letak Geografis.....	27
4.1.2 Kedudukan.....	27
4.1.3 Visi-Misi.....	28
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	28
4.1.5 Susunan organisasi.....	29
4.1.7 Nilai-nilai organisasi.....	30
4.1.7 Tujuan.....	32
4.2 Besarnya kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo tahun 2007-2011.....	33
4.2.1 Gambaran PAD Kota Palopo.....	33
4.2.2 Pajak Daerah Kota Palopo.....	35
4.2.3 Retribusi Daerah Kota Palopo.....	37
4.2.4 Pendapatan yang dipisahkan Kota Palopo.....	39
4.2.5 Pendapatan lain-lain yang sah Kota Palopo.....	41
4.3 Faktor-faktor yang akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palopo tahun 2007-2011	
4.3.1 Jumlah Penduduk Kota Palopo.....	43
4.3.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Palopo.....	45
4.3.3 Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Palopo.....	47
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan asli Daerah Kota Palopo Tahun 2010.....	4
Tabel 1.2 Kondisi PDRB dan PAD Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	5
Tabel 4.1 Realisasi PAD Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	34
Table 4.2 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	36
Table 4.3 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Palopo Tahun 2007-2011	38
Table 4.4 Kontribusi Pendapatan yang diPisahkan terhadap PAD Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	40
Table 4.5 Kontribusi PAD Lain-lain yang Sah terhadap PAD Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	42
Tabel 4.6 Kondisi Jumlah Penduduk dan PAD Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	44
Tabel 4.7 Kondisi Pengeluaran Pemerintah dan PAD Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	46
Tabel 4.8 Kondisi PDRB (Hatga Konstan) dan PAD Kota Palopo Tahun 2007-2011...	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kondisi Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	45
Grafik 2. Kondisi Pengeluaran Pemerintah Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	48
Grafik 3. Kondisi PDRB Kota Palopo Tahun 2007-2011.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan tujuan bagian dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. *(Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999)*

Untuk mempercepat pembangunan di daerah maka pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi pada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Pemberian hak otonomi pada pemerintah daerah ini didasarkan pada tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam garis-garis besar haluan Negara tahun 1998 yaitu: a. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, b. Menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat, c. Meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Diharapkan dengan adanya otonomi daerah (OTODA) dapat memberikan manfaat agar tiap-tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah baik Pajak pendapatan, Retribusi, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain

yang sah. Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan maupun kehidupan setiap individu anggota masyarakat karena pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah haruslah saling menunjang. (Anonim,2006:3)

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Dengan tujuan ini maka pembentukan daerah otonom harus memperhatikan faktor-faktor kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional, serta syarat-syarat lain yang memungkinkan pembangunan, pembinaan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. (Ilyas, 1993:2)

Salah satu bagian yang mempercepat pembangunan ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Kota Palopo sangat disadari oleh Pemerintah Kota. Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota.

Oleh karena itu, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagian pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Sehingga daerah membutuhkan kebutuhan fiskal yaitu kebutuhan untuk menjalankan fungsi dan kewenangan daerah dalam menyediakan pelayanan publik (*expenditure needs*). Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangannya yang diekspresikan dalam wujud kebutuhan fiskal tersebut, setiap daerah memiliki dan dibekali kapasitas keuangan. Secara umum, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya.

Kebijakan fiskal daerah memberi peluang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah. Dari sisi pengeluaran, daerah diharapkan mampu mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat (koswara, 2001). Eksternalitasnya diharapkan merangsang pertumbuhan investasi swasta dan perkembangan perekonomian daerah sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (smoke, 1996).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bersumber dari: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta dan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo tahun 2010 dijelaskan oleh tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2010

Komponen	Realisasi
Pajak Daerah	Rp 4.999.701.535,00
Retribusi Daerah	20.117.286.411,00
Pendapatan yang dipisahkan	924.062.688,91
PAD Lain-lain yang sah	2.177.969.270,75
PAD	Rp 28.219.019.905,66

(www.dppkad.kota.palopo.com)

Data tersebut menunjukkan retribusi daerah memberikan sumbagan terbesar yaitu sebesar Rp 20.117.286.411,00 atau 71,31 persen dari total PAD tahun 2010. Kemudian pajak daerah diposisi kedua dengan jumlah Rp 4.999.701.535,00 dengan persentase 17,71 persen, lalu PAD lain-lain yang sah sebesar Rp 2.177.969.270,75 dengan persentase 7,71 persen dan terakhir pendapatan yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar Rp 924.062.688,91 dengan persentase 3,27 persen.

Sedangkan faktor yang turut mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Palopo diantaranya PDRB. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PDRB. Hal ini sejalan dengan pendapat Bappenas (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Brata (2004) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, Antara PAD dan PDRB terdapat korelasi yang positif. Semakin tinggi PDRB, diharapkan prosentase PDRB terhadap PAD juga meningkat (*tax effort*).

Adapun kondisi PDRB terhadap PAD Kota Palopo tahun 2007-2011 dijelaskan oleh table dibawah ini:

Tabel 1.2
KONDISI PDRB DAN PAD KOTA PALOPO
(HARGA KONSTAN) TAHUN 2007-2011

TAHUN	NILAI PDRB	PERUBAHAN (%)	PAD	PERUBAHAN (%)
2007	743.974,17	0	16.922.555.965	0
2008	799.328,94	7,44	24.905.910.967	47
2009	862.192,23	7,86	21.473.395.222	-13
2010	925.082,15	7,29	28.219.019.906	31
2011	1.000.569,31	8,16	35.262.275.076	24

Sumber: BPS Kota Palopo

Data tabel 1.2 diatas menunjukkan tahun 2007 nilai PDRB sebesar Rp 743.974,17 sedangkan PAD sebesar Rp 16.922.555.965. Tahun 2008 naik 7,44 persen dengan nilai Rp 799.328,94 sedangkan PAD naik 47 persen dengan nilai Rp 24.905.910.967, kemudian naik 7,86 persen ditahun 2009 dengan nilai Rp 862.192,23 sedangkan sebaliknya PAD turun 13 persen dengan nilai Rp 21.473.395.222. Pada tahun 2010 turun menjadi 7,29 persen dengan nilai Rp 925.082,15 namun terjadi peningkatan pada PAD dengan

persentase 31 persen atau dengan nilai Rp 28.219.019.906. Kembali naik 8,16 persen dengan nilai Rp 1.000.569,31 sedangkan PAD naik Rp 35.262.275.076, namun terjadi penurunan secara persentase yaitu 24 persen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul :

“Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian (*research solution*) yang akan dibahas adalah:

1. Seberapa besar kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo tahun 2007-2011?
2. Faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palopo tahun 2007-2011?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo tahun 2007-2011.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo tahun 2007-2011.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo.
2. Bagi calon peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian sejenis lainnya.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo.
4. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan berupa bukti empiris tentang perkembangan PAD Kota Palopo dan informasi bagaimana cara meningkatkannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penulisan ini, penulis membagi kedalam beberapa Bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori dan konsep pembangunan, konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, konsep perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah, dan konsep pendapatan asli daerah, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian yang berisi tentang Jenis Penelitian, Daerah Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis, dan Defenisi Operasional.

Bab IV : Pembahasan yang berisi tentang kondisi geografis, keadaan wilayah dan kependudukan, data realisasi PAD Kota Palopo tahun 2007-2011, hasil analisis deskriptif besarnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo.

Bab V : Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Dan Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno 2000:13). Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

Ada empat model pembangunan (Suryana, 2000: 63) yaitu model pembangunan ekonomi yang beorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan

upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

Todaro (2008:21), mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

2.1.2 Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan, diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi (Rudini, 1995:48 dalam Silalahi, et al, 1995).

Otonomi adalah suatu proses pembagian kekuasaan atau wewenang antara pusat dengan daerah dan diberlakukan mulai 1 januari 2001, dalam pembentukan daerah otonomi diperlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai (Marihot, 2005:1)

Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah (Silalahi, et al, 1995:12) : Pertama, mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu. Kedua, kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi. Ketiga, mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai orientasi berpikir *people centered orientation*. Keempat mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan.

Tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah yaitu (Bird dan Vaillancourt, 2000:4 dalam Susilo, 2002): Desentralisasi, yang berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah. Delegasi yang berhubungan dengan situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Devolusi atau pelimpahan yang berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.

Adapun Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Di dalam Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan Daerah yang terdiri dari : Pertama, pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, dana Perimbangan yang terdiri dari bagi hasil SDA dan non SDA, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) Ketiga, pinjaman daerah dan keempat, lain-lain penerimaan yang sah pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan adalah jumlah dari seluruh uang yang diterima seorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan berasal dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan

seperti sewa, bunga, dan deviden pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Mamesah, 1995:23). Pendapatan daerah adalah semua pendapatan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan (Soehini, 1991:150). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo

(2000) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut undang-undang No.13 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Sedangkan menurut Mardiasono (2002:132), "pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.4 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

Pertama, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah.

Kedua, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ketiga, pendapatan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

Keempat, pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, penerimaan daerah atas keterlambatan pelaksanaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Hubungan Pajak Daerah Terhadap PAD yaitu pajak daerah adalah salah satu komponen dari pendapatan asli daerah sehingga hubungannya positif. Ketika pendapatan pajak daerah suatu daerah meningkat maka pendapatan asli daerah (PAD) cenderung ikut meningkat.

Retribusi Daerah Terhadap PAD hubungannya positif. Retribusi daerah adalah bagian dari komponen pendapatan asli daerah. Retribusi daerah mempengaruhi naik turunnya PAD karena retribusi daerah merupakan fungsi dari pendapatan daerah.

Hubungan Hasil Keayaan Yang dipisahkan Terhadap PAD adalah sama dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah hubungannya positif dan merupakan fungsi dari pendapatan Asli Daerah. Sehingga ketika hasil kekayaan yang dipisahkan meningkat maka PAD akan cenderung meningkat, begitupun sebaliknya.

Hubungan pendapatan Lain-lain yang sah terhadap PAD adalah naik turunnya PAD suatu daerah cenderung juga dipengaruhi oleh pendapatan lain-lain yang sah, dengan kata lain hubungan keduanya positif. Apabila pendapat lain-lain yang sah naik maka PAD akan cenderung naik begitupun sebaliknya, jika pendapatan lain-lain yang sah turun maka PAD juga cenderung turun.

Pendapatan asli daerah (PAD) dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. . Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PDRB. Hal ini sejalan dengan pendapat Bappenas (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Brata (2004) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan penelitian oleh Tambunan (2006) yang menyatakan pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Antara PAD dan PDRB terdapat korelasi yang positif. Semakin tinggi PDRB, diharapkan prosentase PAD terhadap PDRB juga meningkat (*tax effort*). Jika *tax effort* kecil, maka PAD akan memberikan kontribusi yang kecil terhadap belanja daerah. Jika *tax effort* ditingkatkan, maka PAD akan meningkat secara signifikan.

Hubungan jumlah Penduduk terhadap PAD adalah di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Sucipto:1998). Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap PAD yaitu Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan pelayanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh salah satu ahli ekonomi (Sukirno, 1994:169) yaitu dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Mangkusubroto 1994:151).

Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

2.3 Tinjauan Empiris

Adapun penelutian terdahulu yang medekati yaitu: Rina (2009) dengan penelitian “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang”. Peneliti menggunakan metode deskriptif dan meto de regresi komponen utama. Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah). Di Kabupaten Sumedang Selama periode tahun 1994 hingga tahun 1999, potensi pajak daerah di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2000 terjadi penurunan dan terjadi peningkatan kembali pada periode tahun 2001 hingga tahun 2006. Azhari (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisi Pendapata Asli Daerah kota Jambi”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah kota jambi telah dapat menggali sumber-sumber penerimaan secara optimal yaitu dapat meningkatkan realisasi penerimaan PAD rata-rata sebesar 22,56 persen pertahun. Kemudian upaya untuk terus menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan yang potensial telah diambil langsung berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan, termasuk pungutan yang disiplin, jujur dan berwibawa.

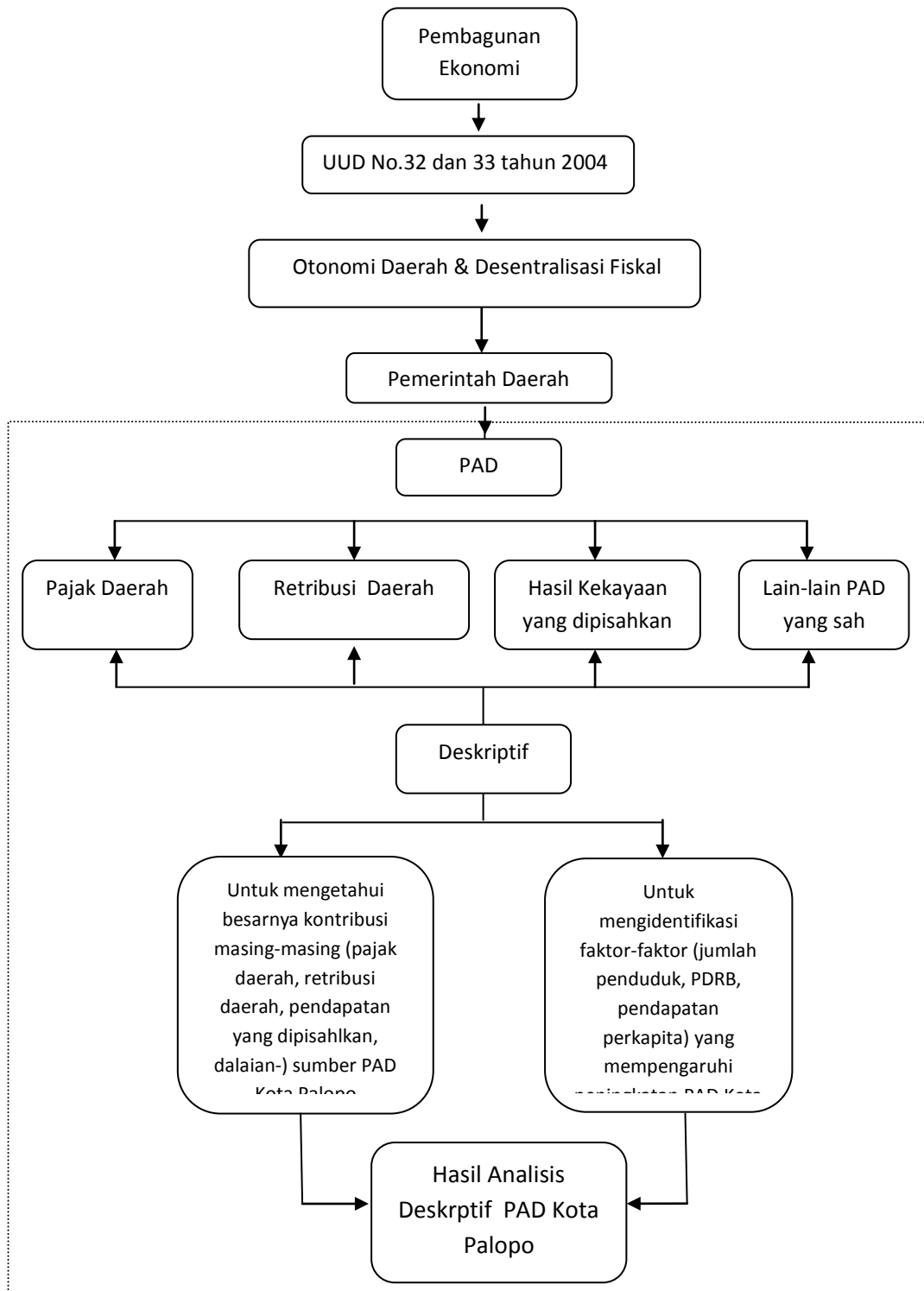
Hakki (2008) meneliti “Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Bogor”. Ia menggunakan metode analisis komponen utama (*Principal Component Analysis/PCA*) dan ha sil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi. Sedangkan penerimaan retribusi daerah di kota

Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, uji kendaraan bermotor, dan jumlah pengunjung obyek wisata. Adapun penulis melakukan penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bogor dengan pertimbangan bahwa perbedaan wilayah penelitian akan memberikan hasil yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis lebih mengkhhususkan pada era otonomi daerah, yaitu selama periode tahun 2005 hingga tahun 2007 dengan menggunakan data bulanan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Adapun skema kerangka pemikiran penulis dijelaskan oleh gambar dibawah ini:



Keterangan: —————> = Alur Penelitian
 = Ruang Lingkup Penelitian

Gambar 2.1 Skema Kerangka Penelitian

2.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo tahun 2007-2011 dibawah 50 persen
2. Faktor-faktor (jumlah penduduk, PDRB dan pengeluaran pemerintah) yang turut mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo secara signifikan tahun 2007-2011